



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI : <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/4044>

EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU TANI DI DESA LINGGASARI KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS

Luna Almira Fanti¹, Denok Kurniasih², Tobirin³

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik-Administrasi Publik, Universitas

Jenderal Soedirman Purwokerto^{1,2,3}

almira.fanti@mhs.unsoed.ac.id, denok.kurniasih@unsoed.ac.id,

tobirin@unsoed.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 20 Desember 2023

Revised date: 1 Januari 2024

Accepted date: 24 Januari 2024

ABSTRACT

The implementation of the Farmer's Card program is a form of government attention to the welfare of farmers in Indonesia. The Farmer's Card is an example of a public service, especially for farmers, which is intended to be used when buying subsidized fertilizer. The implementation of the Farmer Card service is carried out directly by the Agricultural Extension Center (BPP) with Bank Rakyat Indonesia (BRI) as well as fertilizer sellers or retailers. The aim of this research is to determine the effectiveness of the farmer card program in Linggasari Village, Kembaran District, Banyumas Regency. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The effectiveness of the program in this research uses indicators; 1) target success, 2) goal achievement, 3) availability of work facilities and infrastructure, 4) supervision system. The results of the research show that the farmer card program in Linggasari Village, Kembaran District, Banyumas Regency has had a positive impact on farmers in Linggasari Village to get easy access to get subsidized fertilizer at prices set by the central government. Suggestions given include routine outreach, regeneration related to elderly human resources, coordination between retailers complete with kiosks, farmers, and the Banyumas Regency Agricultural Extension Center.

Keywords: effectiveness, farmer card, farmer.

ABSTRAKSI

Implementasi program Kartu Tani ialah sebuah bentuk perhatian pemerintah untuk kesejahteraan petani di Indonesia. Kartu Tani ialah salah satu contoh dari pelayanan publik khususnya kepada petani yang bertujuan untuk dipakai ketika membeli pupuk bersubsidi. Pelaksanaan pelayanan Kartu Tani dilaksanakan langsung oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan Bank Bank Rakyat Indonesia (BRI) serta penjual tau pengecer pupuk. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui efektivitas program kartu tani di Desa Linggasari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif metode dengan pendekatan kualitatif. Efektivitas program pada penelitian ini menggunakan indikator; 1) keberhasilan target, 2) ketercapaian tujuan, 3) ketersediaan sarana dan prasarana kerja, 4) sistem pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kartu tani di Desa Linggasari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas memberikan dampak positif kepada petani-petani di Desa Linggasari untuk mendapatkan kemudahan akses dalam mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Saran yang diberikan antara lain sosialisasi rutin, regenerasi terkait sumber daya manusia lanjut usia, koordinasi antar pengecer lengkap kios, petani, dan Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Banyumas.

Kata Kunci: efektivitas, kartu tani, petani.

PENDAHULUAN

Pertanian ialah sektor perekonomian negara yang utama di Indonesia. Berdasarkan data apada BPS Tahun 2020, pertumbuhan sektor pertanian sejumlah 2,59 persen, 10,47 persen diantaranya didukung oleh subsektor tanaman pangan. Akan tetapi terdapat permasalahan yang dihadapi para petani, diantaranya ialah kelangkaan pupuk bersubsidi. Kelangkaan pupuk bersubsidi berdampak bagi petani, khususnya golongan petani menengah ke bawah dengan tingkat penghasilan yang rendah (Nomita, 2022).

Masyarakat berharap agar pemerintah mampu mensejahterakan pembangunan pertanian di Indonesia. Pembangunan pertanian di Indonesia salah satunya melalui memanfaatkan teknologi modern yang tepat guna dan berkelanjutan. Kegiatan pertanian mayoritas menggunakan pupuk yang bertujuan untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas dari hasil pertanian (Ashari dan Hariyani, 2019).

Pupuk sangat dibutuhkan untuk meningkatkan hasil produktivitas pertanian. Akan tetapi ketika pendistribusian pupuk yang terjadi ialah ketidak stabilan dari harga pupuk, sehingga pemerintah memberi mengeluarkan program pupuk bersubsidi. Penyaluran program pupuk bersubsidi diawasi pelaksanaannya oleh pemerintah di setiap daerah. Pemerintah menyediakan pupuk bersubsidi seperti urea, SP 36, ZA, NPK dan Organik. Akan tetapi pada prakteknya di lapangan tetap ditemui adanya kelangkaan pupuk bersubsidi (Suryana, Agustian & Yofa, 2016).

Pemerintah menetapkan kebijakan yakni Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berfungsi sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam mengawasi alokasi pupuk bersubsidi. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI, pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani di sektor pertanian.

Pemerintah Propinsi Jawa Tengah melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), menghadirkan kartu tani dalam rangka upaya sarana dalam mengoptimalkan kebijakan pupuk bersubsidi untuk petani. Kartu Tani ialah program yng berjalan melalui aplikasi SIM (Sistem Informasi Manajemen) Pangan Indonesia di Jawa Tengah, dengan mengeluarkan kartu debit BRI *cobranding* yang dipakai khusus untuk membaca alokasi pupuk bersubsidi dan transaksi pembayaran

pupuk bersubsidi di mesin *Electronic Data Capture* (EDC) BRI yang ditempatkan pada pedagang pengecer serta dapat berfungsi untuk melakukan seluruh transaksi perbankan pada umumnya. Penggunaan kartu tani terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI). Sistem tersebut berisikan data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang terdiri dari nama petani, luas lahan, jenis tanaman, dan alokasi pupuk yang dibutuhkan petani. Tujuan dari program Kartu tani bagi masyarakat adalah penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dengan berlandaskan pada enam asas yaitu Tepat jenis, Tepat jumlah, Tepat mutu, Tepat lokasi, Tepat waktu, Tepat harga. Petani yang menggunakan kartu tani mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan diseluruh agen atau kios yang telah ditentukan, dimana kegiatan pertanian dapat berjalan aman tanpa terganggu oleh tidak tersedianya pupuk bersubsidi. Kartu tani juga berfungsi sebagai tabungan yang dapat digunakan petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Ashari dan Hariyani, 2019).

Melalui berbagai permasalahan tersebut, dibutuhkan penelitian mengenai efektivitas dari suatu program pemerintah, dalam hal ini ialah kartu tani. Efektivnya program pemerintah difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksana program pemerintahan (Hutagalung & Hermawan, 2018).

Efektivitas yaitu berfokus pada akibatnya ataupun pengaruhnya sedangkan efisiensi memiliki arti ketetapan atau kesesuaian tenaga dan biaya (Megawati, 2015). Efektivitas betujuan mengetahui hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Arfin, *et al.*, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penelitian untuk mengkaji efektivitas program kartu tani di Desa Linggasari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi Publik

Administrasi publik ialah sebuah proses mengenai sumber daya dan seseorang publik yang diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, serta meng-implementasikan, dan mengelola keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik menunjukkan pemerintah bagaimana berperan sebagai agen tunggal yang aktif

dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah yang menurutnya penting dan baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang telah diatur oleh pemerintah (Nurdin dan Amelia, 2019).

Administrasi publik ialah administrasi dari negara yang mengatur agar tercapainya tujuan-tujuan kenegaraan. Administrasi publik ialah bentuk kegiatan pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan politiknya. Pada administrasi publik terdapat orang-orang yang diorganisasikan dan digerakkan demi tercapainya proses pencapaian tujuan untuk masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan pelaksanaan kebijakan (Ashari dan Hariyani, 2019).

Kebijakan Publik

Kebijakan publik ialah suatu rangkaian pilihan yang berhubungan dan dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan dan lain-lain. Kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat yang bisa diramalkan (Nurdin dan Amelia, 2019).

Efektivitas

Efektivitas ialah tingkat dari sebuah sistem sosial dalam mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan. Efektivitas Program merupakan tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan. Menurut Campell, efektivitas dapat dikatakan sebagai tingkat kemampuan lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya atau dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan 4 indikator yaitu (Ashari dan Hariyani, 2019):

1. Keberhasilan sasaran
2. Ketercapaian tujuan
3. Ketersediaan sarana dan prasarana
4. Sistem pengawasan dan pengendalian

Program Kartu Tani

Program Kartu Tani ialah sebuah program berdasarkan gagasan gubernur provinsi Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan distribusi, pengendalian dan pengawasan pupuk bersubsidi terhadap petani. Program bertujuan terwujudnya distribusi pupuk

bersubsidi sesuai dengan asas tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu dan tepat harga, serta pemberian layanan perbankan bagi petani di Jawa Tengah (Jatengprov.go.id, 2017).

METODE

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Dalam metode kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi di pandu oleh kata-kata yang ditemukan pada saat di lapangan (Sugiyono, 2016). Penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder yakni dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Linggasari adalah suatu desa yang berada di Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dengan luas lahan 239,811 ha. Desa Linggasari terdiri dari dusun Karangemiri, dusun Bakung, dan Dusun Linggasari. Mayoritas penduduk Desa Linggasari bekerja sebagai petani, buruh dan pegawai negeri sipil (PNS). Pertanian di Desa Linggasari sangat maju, dengan banyaknya komoditi bengkuang yang merupakan ikon dari Desa Linggasari (Herawati, *et al.*, 2021).

Gabungan Kelompok Tani di Desa Linggasari berkontribusi terhadap hasil panen padi di Kecamatan Kembaran sebesar 9,15% di tahun 2020. Pelaksanaan Program Kartu Tani di Desa Linggasari sudah terlaksana sesuai mekanisme pelaksanaan Program Kartu Tani sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor/11/Kpts/SR.310/B/03/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 mulai dari input RDKK menjadi eRDKK/Pengusulan Kartu Tani hingga penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani.

Efektivitas suatu kebijakan dapat diukur dari ketercapaian tujuan kebijakan itu. Pelaksanaan Program Kartu Tani di Desa Linggasari sudah berjalan sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang ada. Jika dilihat dari layanan produk yang diberikan, Program Kartu Tani memberikan banyak layanan kepada petani, seperti fasilitas pembelian pupuk bersubsidi berdasarkan alokasi. Kartu Tani juga memberikan layanan perbankan bagi petani. Salah satunya melalui kredit pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani pemilik Kartu Tani. KUR dinilai lebih efisien bagi petani dikarenakan jumlah bunga

bank yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit pinjaman lain.

Efektivitas Program Kartu Tani di Desa Linggasari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas

1. Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran dapat diketahui dari latar belakang dan sasaran program. Latar belakang program kartu tani berasal dari berbagai permasalahan terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran juga menjadi latar belakang atau dasar penerapan kartu tani untuk masyarakat. Program kartu tani dibuat atas dasar berbagai permasalahan yang menyangkut kesejahteraan petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Dengan demikian adanya kartu tani dapat mengontrol pendistribusian pupuk bersubsidi pada masyarakat khususnya para petani. Sasaran merupakan penjabaran tujuan yang lebih spesifik dari adanya tujuan program.

2. Ketercapaian Tujuan

Tujuan dari program kartu tani bagi masyarakat adalah sebagai sarana akses layanan perbankan terintegrasi untuk mewujudkan pendistribusian pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Kartu tani secara menyeluruh terdapat tahap-tahap pelaksanaan program kartu tani yang dilaksanakan di Desa Linggasari yaitu sebagai berikut:

- a. Sosialisasi program kartu tani yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi terkait dengan gambaran umum program beserta tata cara program. Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi diharapkan dapat tersampaikan dengan baik sehingga masyarakat mampu menerima dan melaksanakan program yang ditentukan sebelumnya.
- b. Pendataan dan verifikasi data
Pendataan dan verifikasi data merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang nantinya akan dimasukkan pada sistem SIMPI (Sistem Manajemen Pangan Indonesia).
- c. Pendistribusian Kartu Tani
Tahap pendistribusian atau pembagian kartu tani dilakukan di desa/ kelurahan di Kecamatan Kembaran oleh Bank BRI sebagai pihak yang menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam pembuatan kartu debit dan tabungan simpedes serta BPP

Kecamatan Kembaran lebih berperan sebagai pihak yang membantu atau mendampingi terselenggaranya kegiatan pembagian kartu tani di karenakan petani memang lebih dekat penyuluh.

d. Penggunaan Kartu Tani

Kartu tani yang telah dibagikan sebelumnya pada petani dapat dimanfaatkan dalam kegiatan transaksi pembelian pupuk, selain itu juga berfungsi sebagai alat untuk transaksi kebutuhan sehari-hari. Pembelian pupuk bersubsidi dengan kartu tani dapat dilakukan pada kios yang telah ditunjuk secara resmi oleh pemerintah dengan menunjukkan kartu tani yang dimiliki kemudian penjual akan menggesek di mesin EDC, jika terdapat kecocokan dalam data alokasi pupuk dengan mesin EDC maka terjadilah transaksi jual beli pupuk.

3. Tersedianya sarana dan prasarana

Pengguna dari kartu tani adalah petani sebagai yang memiliki kartu tani dan kios pupuk resmi sebagai pihak yang menjual pupuk bersubsidi, sehingga kedua pihak tersebut melakukan kegiatan transaksi jual beli. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh petani dan penjual kios adalah kartu tani, tabungan, mesin EDC dan pupuk. Sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung dalam menunjang program kartu tani. Pemerintah telah menyediakan sarana dan prasarana yang baik bagi pihak-pihak yang melaksanakan program. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya kartu tani itu sendiri, tabungan BRI, alat EDC dan pupuk bersubsidi yang tersedia di kios pengecer, dan pupuk. Untuk admin sebagai pihak yang melakukan pendataan dibutuhkan form rdkk yang terdiri dari nama petani dan luas lahan.

4. Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan yang dilakukan oleh BPP Kecamatan Kembaran adalah dengan mengadakan pertemuan kelompok tani secara rutin pada masing-masing wilayah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pengawasan secara berkala juga dilakukan dengan membuat suatu grup online yaitu grup whats app tingkat kabupaten agar dapat memberikan masukan maupun memberikan laporan permasalahan terkait dengan kartu tani. Pihak Balai Penyuluhan Pertanian juga mendatangi kios pengecer lengkap untuk menanyakan stok pupuk maupun keberlangsungan program kartu tani. Proses

pengawasan kartu tani tidak dapat diawasi secara berkala, hanya saja dilakukan pemantauan melalui pertemuan kelompok petani dengan BPP sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kartu tani membantu para petani di Desa Linggasari mudah mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan harga sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kartu tani juga berfungsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, M. L dan Hariani, D. (2019). Analisis Efektivitas Program Kartu Tani Di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. *Journal Of Public Policy And Management* 8(2) DOI: [10.14710/jppmr.v8i2.23711](https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i2.23711).
- Arfin, D. Usman, J. Sudarmi. (2022). Efektivitas Program Kartu Tani Pada Tata Kelola Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik* 3(6), 1758-1768.
- Herawati, T., Khasanah, A. U.N., Rahayu, S., Fitriani, D. Driartama, I. Wijaya, M. T. (2021). Optimalisasi Potensi Lokal Desa Linggasari, Banyumas melalui Inovasi Olahan Mie Sari Bengkuang. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat* 3(1), 20-26.
- Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2018). *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Deepublish
- [Jatengprov.go.id](https://jatengprov.go.id). (2017). Kartu Tani. Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Jawa Tengah. <https://biroinfrasda.jatengprov.go.id/programkegiatan/kartu-tani/#>
- Megawati, L. (2015). Analisis efektifitas sistem informasi akuntansi yang terotomatisasi pada penggajian karyawan secara efektif dan efisien dalam mendukung operasional perusahaan (Studi Kasus PT. Trikarya Abadi Sejahtera). *EJournal Akuntansi "EQUITY,"* 1(2)
- Nomita, Berliana P. (2022). Evaluasi Program Kartu Tani dalam Mengoptimalkan Distribusi Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Diploma Thesis. Fakultas Ilmu Sosial. Institut Pemerintahan Dalam Negeri: Sumedang.
- Nurdin, I. dan Amelia E. R. (2019). Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. *Jurnal Media Birokrasi*, 1(1).
- Suryana, A., Agustian, A., & Yofa, R. D. (2016). Alternatif Kebijakan Penyaluran Subsidi Pupuk bagi Petani Pangan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 14(1), 35-54.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
- Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2011.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 69/Permentan/SR.310/12/201 6 tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2017.